

PERLU PERUBAHAN ‘MINDSET’ MASYARAKAT

TPS di Nitikan Jadi Percontohan Pengolahan Sampah

YOGYA (KR) - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogya akan menjadikan TPS 3R di Nitikan sebagai pilot project atau percontohan untuk pengolahan sampah dari masyarakat. Akan tetapi tahap awal baru akan menggandeng satu RW di kelurahan setempat yakni Sorosutan sembari memberikan edukasi untuk merubah mindset masyarakat terhadap sampah.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH Kota Yogya Haryoko, menyebut pengolahan sampah diawali dari proses pemilihan sampah organik dan sampah anorganik. Selanjutnya sampah yang sudah terpilah kemudian diolah kembali sampai menyisakan residu. “Residu itu lah yang kemudian disetorkan ke TPA Piyungan. Harapannya seperti itu,” jelasnya, Minggu (21/2).

TPS 3R di Nitikan yang memiliki kapasitas 10 ton perhari, saat ini juga masih tercampur antara sampah organik dengan anorganik. Tahap awal program percontohan, sampah yang masuk ke sana harus sudah terpilah. Sejak dari rumah, sampah yang berni-

lai ekonomi sudah terambil dan dimanfaatkan ke bank sampah setempat. Sehingga, sampah yang tidak termanfaatkan baru dikirimkan ke TPS 3R di Nitikan untuk diolah kembali sampai benar-benar menyisakan residu.

Haryoko menambahkan, pada tahap awal pihaknya akan menjadikan satu RW di Sorosutan sebagai pilot project. Fokus kegiatannya ialah gerakan memilah sampah organik dan anorganik di bank sampah setempat. Jika kegiatan itu sudah menjadi kebiasaan maka ditindaklanjuti dengan penjadwalan pengambilan sampah khusus organik dan anorganik.

“Untuk sekarang ini kami belum sampai pada penjadwalan pengambil-

an sampah karena memang dibutuhkan perubahan mindset dulu dari masyarakat,” imbuhnya.

Kegiatan di TPS 3R tersebut sejauh ini juga masih mengolah sampah dari taman kota berupa sisa-sisa daun. Sampah dikelola menjadi kompos dengan produksi sekitar 10 kubik perhari. Sementara sampah organik dari masyarakat belum dimanfaatkan di TPS 3R Nitikan. Sembari mengulirkan program percontohan pengolahan sampah, kelak semua sampah organik bisa dikelola di TPS tersebut.

Sampah organik berupa sisa makanan dan sayuran akan diolah menggunakan magot. Kemudian sampah organik berupa dedaunan dari warga akan dicampurkan sampah daun dari taman kota untuk diolah menjadi kompos dengan kombinasi bioaktivator. Sedangkan bagi sampah anorganik yang bernilai ekonomi akan ditampung di bank sampah induk milik DLH. **(Dhi)-f**

PEMBUKAAN PBTY XVI-2021 VIRTUAL Akulturasi Budaya dengan Terobosan Wisata



KR-Juvin tarto

Penampilan Tarian Beksan Adhaninggar Kelaswara pada Pembukaan PBTY.

YOGYA (KR) - Gelaran Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta (PBTY) setiap tahunnya saat perayaan Imlek, selalu disambut baik karena memperlihatkan akulturasi budaya yang luhur dan menjadi daya tarik wisata yang kuat di Yogya. Digelar virtual, PBTY XVI-2021 menjadi terobosan wisata di masa pandemi.

“Akulturasi budaya seperti misal ada wayang potehi, wayang China-Jawa dengan sajian cerita-cerita Tionghoa yang dimainkan dengan gaya dan musik Jawa seperti gamelan tentunya sangat menarik wisatawan dengan budaya multikultural,” kata Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X saat membacakan sambutan Gubernur DIY Sri Sultan HB X dalam Pembukaan PBTY XVI-2021 secara Virtual, Sabtu (20/2).

Dikatakan, kehadiran suku bangsa Tionghoa di

Indonesia sejak dulu kala sudah hidup berdampingan bersama suku bangsa Indonesia lainnya dalam keberagaman. “Kesadaran multikultural di DIY ini bisa menjadi pilar Yogya Istimewa,” tegasnya. Senada, Kepala Dinas Pariwisata DIY, Singgih Raharjo SH MED mengapresiasi gelaran PBTY XVI-2021. “Gelaran tahun ini secara virtual/daring justru bisa disaksikan di seluruh dunia dan merupakan inovasi pariwisata di DIY di masa pandemi Covid-19 sebagai bagian dari upaya kita untuk membangun brand awareness untuk para wisatawan baik yang ada di Yogya dan luar DIY,” ungkap Singgih.

Singgih turut hadir terbatas dengan prokes dalam Pembukaan PBTY XVI di Rumah Budaya Ketandan Yogya bersama Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Wahyu

Hendratmoko SE MM, Ketua Umum JCACC Drs T Harry Setio, beberapa Ketua Paguyuban Tionghoa. Di antaranya Ellyn Subiyanti (PSMTI) Jimmy Sutanto (Fu Qing), Muwardi Gunawan (Bhakti Putera) Anwar Priyadi (Hin An Hwee Koan), Gutama Fantoni dan pengurus lainnya.

“Panitia PBTY agar terus membangun ekosistem ekonomi kreatif yang telah berjalan baik setiap tahunnya dalam even PBTY. Misalnya dengan penjualan merchandise, kuliner khas PBTY yang bisa dijual secara daring. Ekonomi kreatif harus jalan berbarengan dengan budaya,” tegasnya.

Sedangkan Ketua Panitia Pelaksana PBTY XVI-2021, Ellyn Subiyanti berharap even virtual ini bisa menjadi pesta budaya sekaligus terus mengenalkan Yogyakarta dengan budaya multikultur yang indah. “PBTY sudah menjadi ikon budaya dan pariwisata Yogya yang akan terus kita jaga,” ujarnya.

Acara PBTY hari pertama ini dimeriahkan penampilan seni Fu Qing Yogya dengan lagu dan tari Yue Yuan Hua Hao dilanjutkan tarian Beksan Adhaninggar Kelaswara oleh Pujokusuman, barongsay, webinar Asal Usul Perayaan Imlek oleh Udaya Halim, Liong Perform dan lainnya mendapat sambutan hangat hingga ribuan viewers di YouTube PBTY Channel. **(R-4)-f**

TAK SEKADAR JADI PENDIDIK

Selama PJJ, Guru Harus Bisa Menjadi Fasilitator

YOGYA (KR) - Pandemi Covid-19 menjadikan pembelajaran tidak bisa dilakukan secara tatap muka, tapi lebih banyak menggunakan model Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Selama PJJ keberadaan guru memiliki peran penting karena harus bisa menjadi fasilitator. Pasalnya di masa pandemi guru tidak hanya sebagai pendidik, namun juga membantu siswa mendapatkan informasi pembelajaran.

“Selama proses PJJ atau model daring, banyak hal yang harus di benahi, karena pembelajaran daring itu menyangkut beberapa pihak dan teknis pelaksanaannya di lapangan. Ada pihak sekolah, guru, siswa dan orangtua serta teknis pelaksanaannya di lapangan sangat dipengaruhi oleh fasilitas hand phone siswa, kuota, sinyal serta internet di sekolah. Untuk itu guru diharapkan bisa menjadi fasilitator berbagai sumber pengetahuan,” kata pengamat pendidikan sekaligus mantan Ketua PGRI DIY, Ahmad Zainal Fanani Spd MA di Yogyakarta, Minggu (21/2).

Zainal Fanani mengungkapkan, tantangan pendidikan dalam situasi pandemi semakin kompleks. Untuk itu guru tidak hanya dituntut menjadi pendidik saja tapi juga

fasilitator terhadap berbagai pengetahuan

Pelatihan-pelatihan bagi guru, ke depan harus berdasarkan praktik yang ada, yaitu guru sebagai fasilitator. Kinerja guru juga akan dievaluasi, khususnya bagaimana mereka mendampingi siswa-siswinya dalam melakukan pembelajaran.

Walaupun sebetulnya sejumlah upaya sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan yang sempat mewarnai pelaksanaan PJJ. Namun sebagian besar kendala yang sebelumnya mendominasi. Seperti fasilitas handphone siswa, kuota atau sinyal internet relatif tidak masalah. Namun semangat belajar siswa dalam mengikuti pelajaran yang kurang, masih menjadi tantangan bagi guru dan orangtua.

“Meski PJJ sudah hampir berlangsung selama 1 tahun, tapi bukan berarti tidak ditemukan adanya kendala. Terutama yang berkaitan dengan semangat belajar siswa, karena saat ini ada kecenderungan mereka mulai bosan. Akibatnya tidak jarang mereka dalam mengumpulkan tugas kurang atau sering terlambat, sehingga numpuk sampai akhir semester. Untuk itu harus ada kerja sama antara sekolah, wali kelas, guru dan orangtua siswa,” paparnya. **(Ria)-f**

BANGUN KETAHANAN PANGAN KONDISI DARURAT

Cadangan Beras Ditambah 15 Ton

YOGYA (KR) - Tahun ini Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogya mengalokasikan 15 ton beras untuk dimasukkan dalam cadangan. Program cadangan beras sudah dimulai sejak dua tahun lalu dan saat ini sudah teralokasi 16,75 ton.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogya Suyana, menyebut target beras yang akan dicadangkan mencapai 120 ton. “Memang masih jauh dari target tetapi setiap tahun akan terus kita tambah sampai sesuai. Jadi tidak bisa dipenuhi dalam satu tahun anggaran,” tandasnya, Minggu (21/2).

Program cadangan beras tersebut untuk membangun ketahanan pangan di Kota Yogya. Berbeda dengan program yang digulirkan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) yang memiliki

kegiatan serupa namun untuk antipapasi bencana.

Ketahanan pangan yang dimaksud Dinas Pertanian dan Pangan, imbuh Suyana, belum mampu dipahami dengan baik oleh masyarakat. Hal ini karena kebanyakan masyarakat masih menilai jika memiliki kemampuan finansial maka kebutuhan pangan bisa terjamin. “Ya kalau ada uang kemudian ada pangan yang bisa dibeli tidak masalah. Tetapi jika uangnya ada namun pangannya tidak ada, bisa jadi persoalan. Makanya cadangan beras dibutuhkan untuk menjaga ketahanan pangan,” urainya.

Oleh karena itu, cadangan beras baru akan dikeluarkan jika terdapat kondisi kekurangan pangan. Pendistribusiannya pun harus didasarkan pada keputusan walikota sebagai dasar

untuk dapat mengaksesnya. Selama dua tahun ini pun cadangan beras belum pernah digunakan.

Suyana menyebut, program cadangan beras dikerjasamakan dengan pihak ketiga yakni PD Tumartani yang digunakan sebagai gudang penampungan. Meski sudah dua tahun tidak digunakan namun bukan berarti kondisi beras yang dicadangkan sudah mulai usang atau tidak layak konsumsi. Sesuai akta kerja sama, pihak ketiga berhak untuk mengelolanya namun jika sewaktu-waktu dibutuhkan harus ada dalam kondisi baru.

Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kondisi beras yang masuk dalam program tersebut. Hal ini karena beras yang kelak akan dikeluarkan dari gudang dipastikan layak konsumsi. **(Dhi)-f**

KPID DIY FASILITASI PERPANJANGAN IPP

Dorong LP Penuhi Kuota 10 % Konten Lokal

YOGYA (KR) - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY secara maraton merampungkan proses verifikasi faktual dan dialog terhadap dua Lembaga Penyiaran (LP) Trans TV Yogyakarta dan Trans 7 Yogyakarta selama dua hari, Kamis-Jumat (18-19/2).

Kegiatan tersebut sebagai bagian proses perpanjangan izin dua LP Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) yang masa berlaku Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) akan habis. “Kegiatan ini merupakan proses yang harus dilalui yang juga amanat regulasi tentang penyiaran. Selain itu sebagai bentuk tugas dan tanggungjawab kami kepada Gubernur dan DPRD DIY,” kata Ketua KPID DIY Dewi Nurhasanah, Jumat (19/2).

Rangkaian proses diawali dengan verifikasi faktual mendatangi kantor studio dan pemancar kedua LP terse-

but di Ngoro-Oro Patuk Gunungkidul, Kamis (18/2). Sedang dialog dengan kedua lembaga penyiaran tersebut dilaksanakan di Hotel Tentrem Yogyakarta, Jumat (19/2) yang juga dihadiri perwakilan Diskominfo DIY serta Balai Monitoring Kelas I Yogyakarta. “Kami langsung lakukan verifikasi. Hasilnya secara faktual memang baik dan bisa dilanjutkan untuk prosesnya,” sambung Dewi.

Terpisah, Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Siaran KPID DIY Yohanes Suyanto yang salah satunya membidani perihal perizinan menjelaskan, saat ini memang untuk proses perizinan lembaga penyiaran, baik radio, televisi dan radio komunitas (rakom) sudah secara online. Sehingga proses Evakuasi Dengar Pendapat (EDP) yang sebelumnya menjadi bagian proses perijinan, saat

ini banyak ditinggalkan KPID di beberapa wilayah.

“Memang beberapa KPID tidak lagi mengadakan EDP. Tapi karena amanah dan bentuk pertanggungjawaban kami kepada gubernur dan DPRD, tetap dilakukan. Hanya saja konsepnya tidak lagi EDP. Tapi lebih pada diskusi dan saling memberi masukan,” jelasnya.

Menurutnya, proses ini penting untuk mendorong lembaga penyiaran agar dapat memenuhi amanat Perda DIY No 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran, khususnya dalam pemenuhan 10 persen konten lokal bagi lembaga penyiaran yang melakukan siaran lokal di Yogyakarta. “Kontribusi untuk Yogyakarta agar makin diperkuat dengan memenuhi kuota 10 persen konten lokal tersebut,” tegasnya. **(Feb)-f**

BELUM BANYAK DIMANFAATKAN MASYARAKAT

Tiap Tahun, BBTCLPP Miliki Ratusan Kajian



KR-Istimewa

Para peserta pelatihan secara daring.

YOGYA (KR) - Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta, setiap tahun memiliki puluhan bahkan hampir ratusan kajian. Hanya saja, sampai saat ini belum mempunyai kemampuan untuk membahasakan kajian itu menjadi lebih teknis maupun menjadi bahasa yang lebih umum, sehingga bisa dimanfaatkan oleh lintas program dan lintas sektor serta masyarakat.

Karena itulah, BBTCLPP Yogyakarta mengadakan kegiatan Pembahasan dan Penyusunan Laporan Analisis Data Laboratorium, Kamis-

Jumat (18-19/2). “Pada pelatihan ini kami ingin belajar bagaimana memvisualisasikan itu, bagaimana membahas kajian itu dengan baik dan kami juga ingin belajar bagaimana nantinya kita dapat membahas kajian itu dalam media massa,” kata Kepala BBTCLPP Yogyakarta, Dr dr Irene MKM saat membuka kegiatan ini.

Dalam siaran pers yang diterima redaksi KR, Sabtu (20/2), dijelaskan, pelatihan secara daring ini diikuti 68 peserta dan menampilkan narasumber pakar di bidangnya. Narasumber pertama Dr Dwiarto Rubiyanto SSI MSI (UII) dengan materi “Menghindari pla-

giarism data. Penyusunan karya tulis ilmiah analisis data laboratorium. Selanjutnya Ahmad Luthfie SS MA (Wapemred Kedaulatan Rakyat) membahas pedoman dan syarat penulisan ilmiah di media massa. Hari kedua menghadirkan Hendro Subagyo MEng (PDDI LIPI Jakarta) dengan materi Seni visualisasi data hasil pemeriksaan laboratorium air minum dan pengelolaan media dengan ISSN. Terakhir Dr drg Doby Pramono SU MDSc (UGM) membahas teknik analisis data pemeriksaan laboratorium air minum secara analitik.

Dr Irene berharap, setelah adanya pelatihan ini kajian-kajian yang dilakukan oleh BBTCLPP Yogyakarta dapat lebih memberikan kontribusi terhadap upaya dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit. “Semoga hasil dari pelatihan ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kapasitas para peserta dalam melakukan penulisan dan menyajikan kajian dengan lebih baik,” harapnya.

Ditambahkan, BBTCLPP Yogyakarta ini merupakan salah satu dari unit pelaksana teknis dari Ditjen P2P Kementerian Kesehatan Indonesia yang memang for bussinesnya melakukan kajian-kajian kemudian memberikan solusi dalam teknologi tepat guna. “Di unsur kaji ini tentunya setiap kami melakukan kajian harus ditulis,” tambahnya. **(Fie)-f**

BADAN KOORDINASI TKA DAN TPA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Menyalurkan Donasi Bantuan Bencana di Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan

BADAN Koordinasi Taman Kanak Kanak Al Qur'an dan Taman Pendidikan Al Qur'an Daerah Istimewa Yogyakarta berdiri pada 28 Oktober 1990. Dengan visi menyiapkan generasi Qur'ani mewujudkan masa depan gemilang Keberadaan Badko TKA-TPA me-naungi 5 Badan Koordinasi ditingkat Kabupaten/Kota, 78 di tingkat Kecamatan /kapanewon/kemantren dan 4.278 unit dengan 21.795 ustadz/ah dan 150.064 Santriwan/santriwati di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada Masa Pandemi Covid-19 Kegiatan Belajar Mengajar pada Unit TKA TPA tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan 5 M. Bersama dengan adanya pandemi covid -19 dan bencana alam yang terjadi Badan Koordinasi Taman Kanak Kanak Al Qur'an dan Taman Pendidikan Al Qur'an Daerah Istimewa Yogyakarta juga menggalang donasi untuk meringankan beban baik internal maupun eksternal. Dengan gerakan ketahanan pangan bagi aktifis yaitu pelatihan ketrampilan , pem-



Proses pembangunan gedung TPA Darurat



Bantuan diserahkan oleh Ketua Umum Badko TKA-TPA DIY Ust. M. Muhsonef, M.Hi kepada Direktur Nasional LPPTKA BKPRMI Ust. Gunawan, HS

bagian bibit tanaman dan alat kesehatan bagi tenaga pengajar dan santri TKA TPA.

Dalam merespon adanya bencana alam yang terjadi di Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan Badan Koordinasi Taman Kanak Kanak Al Qur'an dan Taman Pendidikan Al Qur'an Daerah Istimewa Yogyakarta menghimpun dana donasi dari para santri, ustadz/ah dan masyarakat yang di dukung Badko Daerah, Badko Rayon dan Unit unit TKA-TPA di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah Donasi yang terkumpul Rp. 272.313.600. Bantuan tersebut di salurkan melalui LPPTKA –BKPRMI Pusat untuk selanjutnya diserahkan kepada Pengurus LPPPTKA-BKPRMI Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan.

Wujud dari donasi tersebut antara lain pembangunan Taman Pendidikan Al Qur'an darurat , perangkat pembelajaran, Alat Tulis, Al Qur'an, Iqro, Sembako, pakaian dan kebutuhan lainnya. **(feb)**